

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Juznia. 2002. Studi Kualitatif mengenai Alasan Menyitir Dokumen :Kasus pada Lima Mahasiswa Program Pascasarjana Akuntansi Bogor. **Jurnal Perpustakaan Ekonomi** Vol. 11, No. 2 Edisi Juli. Bogor, Pusat.
- Ali, Lukman,dkk, 1995, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, edisi kedua, Depdikbud Balai Pustaka, Jakarta.
- Arikunto. 2008, **Penelitian Tindakan Kelas**, Jakarta: Bumi Aksara
- Ayu, Juliastuti, 2013, **Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Tranparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Propinsi Sumatra Barat)**, (Tidak dipublikasikan) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2014, **Ponorogo Dalam Angka (Ponorogo In Figures 2014)**, Penerbit Badan Pusat Statistik, Ponorogo.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publiksebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). (Tidak dipublikasikan) **Simposium Nasional Akuntansi X**. Makasar.
- Ghozali Imam, 2006, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**, Cetakan IV, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2007. **Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19**. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah**, Edisi 3, Penerbit Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Indradi, Syamsiar, 2001. **Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD Terhadap kinerja DPRD Pada Saat Melakukan Fungsi Pengawasan**. (Tidak dipublikasikan) Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta.

Jufri, Darma, & Ali Fikri Hasibuan, 2012, Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. **Jurnal Mediasi** Vol. 4 N0.1 Juni 2012.

Kawedar, warsito dkk, 2008. **Akuntansi Sektor Publik**, Semarang UNDIP.

Kurnia, Utami & Efrizal Syofyan, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, **Jurnal WRA**, Vol. 1 No. 1, 1 April 2011.

Lembaga Administrasi Negara, 2000, **United Nations Development Programme (UNDP)**.

Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XV/MPR/1998 **tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah**.

Mardiasmo, 2002, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mayasari, Rosalina Pebrika, 2012, **Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Variabel Moderating**.

Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1999, **Tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2013 **tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**. (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.

Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 **tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Mujtaba, Agung, 2013, **Pengertian Anggaran Sektor Publik! Fungsi, Prinsip, dan Jenis Anggaran Sektor Publik**. (<http://pendidikan776.blogspot.com>) di akses 23 mei 2014.

Nawawi, Hadari, 1998, **Manajemen Sumber Daya Manusia : Untuk Bisnis Yang Kompetitif**, Yogyakarta. (<http://maulidil.blogspot.com>). Di akses 23 mei 2014.

- Nazir Mohammad, 2005, **Metode Penelitian**, Edisi 6, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nimas, Ayu Palupi, 2012, Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi. **Accounting Analysis Journal** 1 (2) (2012).
- Novietta, Liza, 2010, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengetahuan Eksekutif tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. **Jurnal Keuangan dan Bisnis**, Vol 2, No. 1, maret 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 **tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah** (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 **Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran**. (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.
- Pramita, Yulinda Devi, Lilik Andriyani, 2010, Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Se-Keresidenan Kedu). (Tidak dipublikasikan) **Jurnal SNA XIII**, Universitas Jendral Soederman Purwoketro. www.sna13purwoketro.com
- Prayoga, Yenny Zelviana, (2013), **Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya Apbd Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Ariabel Moderating**. (Tidak dipublikasikan) Skripsi S1, Akuntansi-Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura, 2013.
- Rahayu, Cici, 2011, **Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi**, (Tidak dipublikasikan) Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Rahman, Syaifur, 2010, **Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderat (Studi Empiris pada DPRD Kota Pekanbaru)**.

- Roseptalia, Rima. 2006. **“Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.”** (Tidak dipublikasikan) Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ruslan, Rosady,2003,. **Metode penelitian Public Relations dan Komunikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Slamet,2010. **Metode Penelitian Kuantitatif Plus Aplikasi Program SPSS**, Pusat Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Simson, Werimon, Iman Ghozali, Mohammad Nazir, 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua), (Tidak dipublikasikan) **Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X**, UNHAS Makasar 26-28 Juli 2007. www.nitropdf.com
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Tidak dipublikasikan) **Simposium Nasional Akuntansi VI**. Surabaya.
- Sopannah dan Wahyudi. 2003. **“Pengaruh Komitmen Organisasi dan Komitmen Profesi terhadap kepuasan kerja auditor (Studi Empiris pada KAP di Yogyakarta).** (Tidak dipublikasikan) Skripsi. FE Universitas Muhammadiyah Magelang..
- Sugiyono, 2006, **Statistika Untuk Penelitian**, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Administratif dilengkapi dengan Metode R&D**, Cetakan 21, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto, 2011, **Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS**, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. (Tidak dipublikasikan) **Simposium Nasional Akuntansi X**. Makasar.

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 **tentang Keuangan Negara**. Dalam (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 **tentang Pemerintah Daerah**. Dalam (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.
- Undang-undang No. 27 Tahun 2009 **tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD**. Dalam (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 06 September 2014.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 **tentang Otonomi Daerah**. Dalam (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**. Dalam (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses 02 Februari 2014.
- Utami, Kurnia & Syufyan Efrizal, (2013), Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. **Jurnal WRA**, Vol. 1, No. 1 April 2013.
- Utomo, Hari, (2011), **Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah(Apbd) (Studi Empiris Pada Dprd Kota/Kabupaten DanDprd Provinsi Jawa Tengah)**, (Tidak dipublikasikan) Sekripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Yudono, Bambang, (2002), **Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan pemerintah Daerah**, <http://www.bangda.depdagri.go.id>. Diakses 23 Mei 2014
- Yudoyono, Bambang, 2003, **Otonomi daerah : desentralisasi dan pengembangan SDM aparatus Pemda dan anggota DPRD**. <http://library.um.ac.id>, diakses 23 Mei 2014.
- Widyaningsih, Aristanti, & Yenny Zelviana Prayoga, 2012, Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif tentang anggaran terhadap Pengawasan Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Penelitian Pada DPRD Kabupaten Sukabumi). **Media Riset Akuntansi**, Vol. 2 No.1 Februari 2012.

Wulandari, Indah, 2013, **Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang**, (Tidak dipublikasikan) Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Wulandari, Nur Endah, 2011, **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak)**, (Tidak dipublikasikan) Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang

<http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>
www.google.com